



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Meskipun demikian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang

Singatta, 24 Februari 2026
Kepala Badan

Januar Bayu Irawan, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP 198501122011011003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	I-1
PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	I-2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	I-2
1.2.2 Data Pegawai	I-5
1.2.3 Anggaran	I-7
1.3 Dasar Hukum	I-7
1.4 Sistematis Laporan Kinerja	I-7
BAB II	II-1
PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	II-1
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025	II-3
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-4
BAB III	III-1
AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Capaian Kinerja	III-1
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	III-2
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	III-2
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	III-4
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	III-7
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	III-8
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	III-9
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	III-15
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	III-17



3.2 Realisasi Anggaran	III-42
3.2.1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah		III-55
BAB IV	IV-1
PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	Lam-1



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kutai Timur	I-6
Tabel 1.2	Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025	I-7
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	II-1
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025	II-2
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2025 Bappeda	II-3
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Bappeda	II-5
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025	II-5
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	III-2
Tabel 3.2	Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025	III-2
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	III-3
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	III-5
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota	III-6
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	III-7
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	III-13
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	III-15
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	III-37
Tabel 3.10	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	III-50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur OrganisasiI-4

BAB I PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi



kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- Menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi;
- Mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- Merencanakan bahan kebijakan pembangunan Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Mengkoordinasikan penyiapan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai bahan utama Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

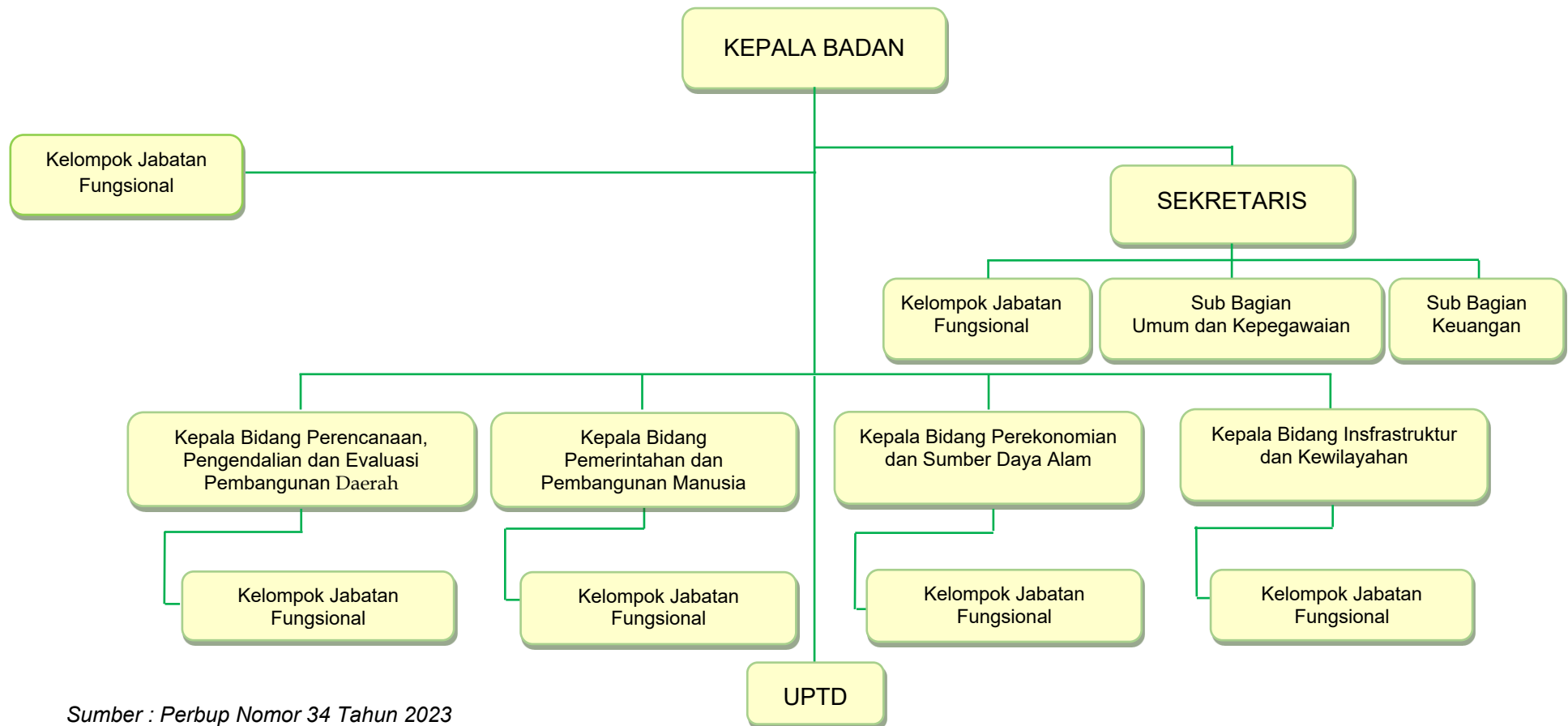


- Mengkoordinasikan penghimpunan dan penganalisisan hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kepala PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- Merencanakan penyusunan evaluasi rencana pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD;
- Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis penyelenggaraan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan;
- Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan lingkup bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- Membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan Bappeda;
- Membina kelompok jabatan fungsional;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- Melakukan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berikut bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



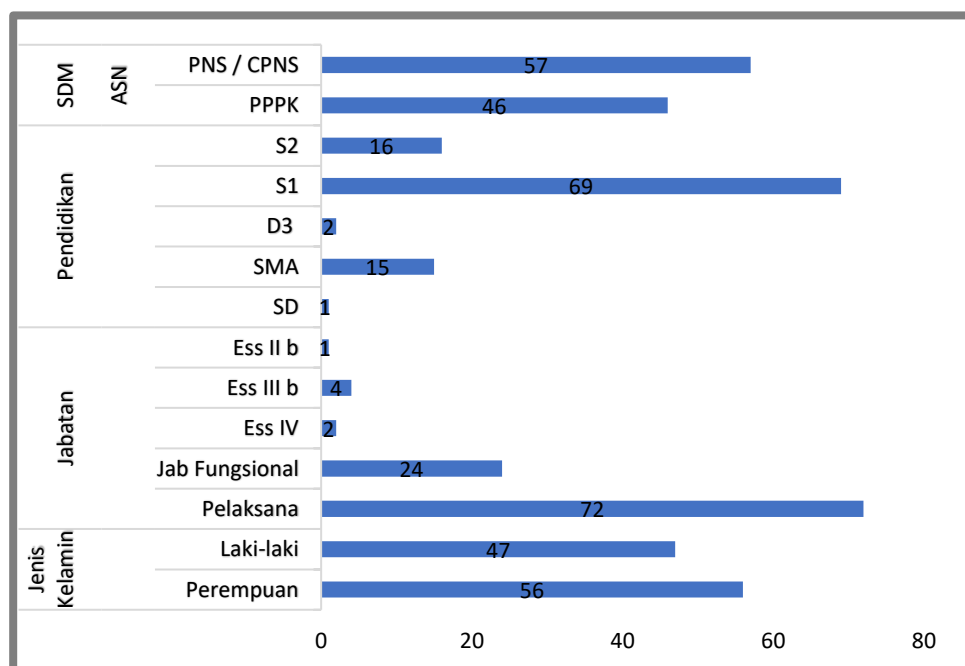
Sumber : Perbup Nomor 34 Tahun 2023



1.2.2 Data Pegawai

SDM merupakan elemen terpenting bagi Perangkat Daerah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bappeda Kabupaten Kutai Timur memiliki tugas dan fungsi dibidang perencanaan, dalam memberikan pelayanan yang baik Bappeda di dukung SDM sebanyak 103 orang. Profil SDM Bappeda disajikan pada Gambar 2.2.

Gambar 1.2 Profil Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda



Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Bappeda, Desember 2025

Berdasarkan profil SDM Bappeda kondisi ketersediaan sumber daya manusia menunjukkan gambaran sebagai berikut :

- a. Dilihat dari komposisi jenis kepegawaian, terdapat 57 orang berstatus PNS (55%) dan 46 orang berstatus PPPK (45%);
- b. Dari aspek kualifikasi pendidikan, SDM yang berpendidikan SD-SMA sebanyak 16 orang (16%), D3 sebanyak 2 orang (2%), S1 sebanyak 69 orang (67%), dan S2 sebanyak 16 orang (15%). Komposisi ini mengindikasikan bahwa 83% aparatur memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1, yang menjadi modal dasar kuat untuk menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah;



- c. Untuk jabatan struktural, dari kebutuhan delapan orang telah terisi 7 (tujuh) 100% terisi. Pada jabatan fungsional terdapat kesenjangan signifikan dimana dari total kebutuhan 62 orang, baru terisi 24 orang dengan 38 posisi kosong atau tingkat pengisian hanya 38,7%. Sementara untuk kategori pelaksana menunjukkan kondisi lebih baik dengan 73 dari 85 kebutuhan telah terisi atau tingkat pengisian 85,9% dengan 12 posisi kosong. Secara keseluruhan, dari total kebutuhan 155 orang, saat ini terisi 103 orang atau tingkat pengisian 66,45% dengan kekurangan 52 orang;
- d. Berdasarkan jenis kelamin ASN Bappeda terdiri dari laki-laki sebanyak 47 orang (46%) dan perempuan sebanyak 56 (54%), data menunjukkan komposisi yang cukup seimbang, bahkan sedikit lebih banyak perempuan. Ini merupakan indikator positif yang menunjukkan adanya kesetaraan gender, yaitu tidak ada hambatan sistematis bagi perempuan untuk menjadi ASN di Bappeda. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsi, tidak terdapat diskriminasi yang berkaitan dengan perbedaan suku, agama, dan ras.



1.2.3 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2024	Rp. 54.238.171.428,-
APBD	2025	Rp. 34.739.791.842,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2025

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah :



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Periode Rencana Strategis**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik			Nilai SAKIP	-	-	-	73	74
		1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	-	-	-	100%	100%
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	84.55%	85.55%	86.55%	100%	100%
		1.4.2.1	Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah.	Persentase capaian evaluasi LAKIP	75.00%	80.00%	85.00%	-	-
		1.4.2.2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	80.00%	87.00%	89.00%	100%	100%
		1.4.2.3	Terpenuhinya Kesesuaian	Konsistensi Penjabaran RPJMD	83.55%	84.55%	85.55%	100%	100%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	terhadap Renstra Perangkat Daerah					

Sumber : Revisi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	1.4.1#0.1	Nilai SAKIP	-	Ketercapaian dokumen kinerja perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) / Inspektorat Kab. Kutai Timur	Bappeda
1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	1.4.1.1#0.1	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	prosentase	Ketercapaian kegiatan yang terealisasi pada program penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah Target Kegiatan yang Terealisasi dibagi dengan Jumlah Target Kegiatan dikalikan 100 %	Bappeda
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPDP	prosentase	Keselarasn antara jumlah program dalam RKPDP dengan Jumlah program pada RPJMD tahun ke n	(Jumlah Program Dalam Dokumen RKPDP) : Jumlah Program Dalam Dokumen RPJMD) x 100%	Bappeda



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.4.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	1.4.2.1#0.1	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	prosentase	Keselarasn antara jumlah program dalam RKPD dengan Jumlah program pada RPJMD tahun ke n	(Jumlah Program Dalam Dokumen RKPD) : (Jumlah Program Dalam Dokumen RPJMD) x 100%	Bappeda
1.4.2.2	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	1.4.2.2#0.1	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	prosentase	Keselarasn antara jumlah program dalam Renstra dan Renja dengan Jumlah program pada RPJMD dan RKPD tahun ke n	(Jumlah Program Dalam Dokumen Renstra dan Renja Seluruh PD Tahun n) : (Jumlah Program Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD Tahun n) x 100%	Bappeda

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan			Nilai SAKIP	-	74



No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	Keuangan yang Baik					
		1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	prosentase	100%
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	prosentase	100%
		1.4.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	prosentase	100%
		1.4.2.2	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	prosentase	100%

Sumber : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai SAKIP	74
	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	100%
1.4.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	100%
1.4.2.2	Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100 %	24.161.868.122,00



BAB II PERENCANAAN KINERJA

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	100 %	344.013.110,00
1.4.2.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	179.533.110,00
1.4.2.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Laporan	77.215.000,00
1.4.2.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	87.265.000,00
1.4.2.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta laporan Keuangan	100 %	17.833.942.915,00
1.4.2.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/bulan	17.295.513.545,00
1.4.2.1.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80 Dokumen	449.302.370,00
1.4.2.1.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5 Laporan	89.127.000,00
1.4.2.1.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD	100 %	23.280.000,00
1.4.2.1.1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	113 Orang	23.280.000,00
1.4.2.1.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100 %	2.555.994.579,00



BAB II PERENCANAAN KINERJA

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.154.627.579,00
1.4.2.1.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	521.344.000,00
1.4.2.1.1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Laporan	880.023.000,00
1.4.2.1.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	100 %	1.346.400.000,00
1.4.2.1.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	1.346.400.000,00
1.4.2.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan penunjang operasional kantor	100 %	1.100.595.018,00
1.4.2.1.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	360.000.000,00
1.4.2.1.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	740.595.018,00
1.4.2.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100 %	957.642.500,00
1.4.2.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	422.750.000,00



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	234.400.000,00
1.4.2.1.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	300.492.500,00
1.4.2.2.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	5.554.299.470,00
1.4.2.2.1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD	100 %	4.239.846.400,00
1.4.2.2.1.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1.002.146.715,00
1.4.2.2.1.1.2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 BeritaAcara	113.496.000,00
1.4.2.2.1.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 BeritaAcara	40.669.000,00
1.4.2.2.1.1.4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BeritaAcara	409.659.000,00
1.4.2.2.1.1.5	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2.820 Usulan	120.388.000,00
1.4.2.2.1.1.6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3 Dokumen	2.553.487.685,00
1.4.2.2.1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Tersusunnya Dokumen Bahan RKPD	100 %	223.005.000,00



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.4.2.2.1.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	111.581.000,00
1.4.2.2.1.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	60 Orang	111.424.000,00
1.4.2.2.1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen LKJIP dan LKPJ	100 %	940.078.870,00
1.4.2.2.1.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	6 Laporan	502.598.250,00
1.4.2.2.1.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	437.480.620,00
1.4.2.2.1.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi SIPD pada penyusunan Perencanaan Daerah	100 %	151.369.200,00
1.4.2.2.1.4.1	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	29.265.000,00
1.4.2.2.1.4.2	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	122.104.200,00



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.4.2.3.1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD ke dalam Renstra dan Renja OPD	100 %	5.023.624.250,00
1.4.2.3.1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	1.864.267.200,00
1.4.2.3.1.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	umlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	191.858.000,00
1.4.2.3.1.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	136.936.000,00
1.4.2.3.1.1.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	1.136.172.200,00
1.4.2.3.1.1.4	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	41.147.000,00



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.3.1.1.5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	106.220.000,00
1.4.2.3.1.1.6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	251.934.000,00
1.4.2.3.1.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	1.746.424.000,00
1.4.2.3.1.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	370.077.000,00
1.4.2.3.1.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	117.097.000,00
1.4.2.3.1.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	256.488.000,00



BAB II PERENCANAAN KINERJA

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.3.1.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	312.050.000,00
1.4.2.3.1.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3 Dokumen	214.417.000,00
1.4.2.3.1.2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	111.099.000,00
1.4.2.3.1.2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	204.384.000,00
1.4.2.3.1.2.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	160.812.000,00
1.4.2.3.1.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya Kegiatan Perencanaan OPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	1.412.933.050,00
1.4.2.3.1.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya	3 Dokumen	467.668.050,00



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
1.4.2.3.1.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	145.250.000,00
1.4.2.3.1.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	115.164.000,00
1.4.2.3.1.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	204.583.000,00
1.4.2.3.1.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	123.768.000,00
1.4.2.3.1.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	206.914.000,00
1.4.2.3.1.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	2 Laporan	65.784.000,00



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
1.4.2.3.1.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	83.802.000,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.2 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Predikat
1	Sangat Memuaskan	AA (Nilai > 90 – 100)
2	Memuaskan	A (Nilai > 80 – 90)
3	Sangat Baik	BB (Nilai > 70 – 80)
4	Baik	B (Nilai > 60 – 70)
5	Cukup (Memadai)	CC (Nilai > 50 – 60)
6	Kurang	C (Nilai > 30 – 50)
7	Sangat Kurang	D (> 0 – 30)

Sumber: Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :



Tabel 3.3 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai SAKIP	74				Bappeda
1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Bappeda
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	100%	98.64%	98.64%	Sangat Tinggi	Bappeda
1.4.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Bappeda
1.4.2.2	Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Bappeda

Sumber : Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Berdasarkan data yang disajikan di atas, terdapat capaian kinerja Bappeda yang belum memenuhi target yaitu :



- Tujuan I Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik dengan Indikator Kinerja Nilai Sakip dengan target 74 dan realisasi kinerja tahun 2024 67.65 dengan kategori Baik, sedangkan untuk realisasi kinerja tahun 2025 sedang dilakukan penilaian oleh Inspektorat;
- Tujuan II Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD dengan target sebesar 100 % dan realisasi kinerja 98.64% dengan capaian kinerja 98.64%.

Dari tiga sasaran strategis satu sasaran strategis belum mencapai target yaitu Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang mempunyai target 100 % dan realisasi kinerja 98.64% dengan capaian kinerja 98.64%. (sangat tinggi)

Dengan demikian, secara umum Bappeda Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2021-2026.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai SAKIP	-	-	67.65	74		



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1.1	Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang baik.	Persentase capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	-	-	100%	100%	100%	100%
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	93.75%	98.97%	99.32%	100%	98.64%	98.64%
1.4.2.1	Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah.	Persentase capaian evaluasi LAKIP	100%	100%	-	-	-	-
1.4.2.2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	99.66%	98.97%	99.32%	100%	98.64%	98.64%
1.4.2.3	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Renstra Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data yang disajikan di atas, perkembangan kinerja secara umum meningkat yaitu :

- Tujuan I Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik dengan Indikator Kinerja Nilai Sakip, tahun 2022- 2023 tujuan tersebut belum



menjadi indikator tujuan Bappeda, setelah dilakukan revisi Renstra Bappeda pada tahun 2023 indikator Nilai Sakip menjadi indikator tujuan Bappeda dan dilaksanakan pada perubahan Renja Bappeda Tahun 2024. Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik dengan Indikator Kinerja Nilai Sakip Tahun 2024 target kinerja 73 dengan realisasi kinerja sebesar 67.65 berdasarkan hasil LHE AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Timur. Pada tujuan I memiliki 1 sasaran yaitu Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik dengan indikator Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan dengan target 100% dan realisasi kinerja sebesar 100% dan capaian kinerja tahun sebelumnya juga sama 100%

- Tujuan II Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD dengan tren Capaian Kinerja Positif tahun 2022–2024, selama tiga tahun berturut-turut terjadi peningkatan konsisten dari 93,75% hingga 99,32% pada 2024, menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam konsistensi perencanaan, sedikit terjadi penurunan di 2025 realisasi kinerja sebesar 98,64% turun 0,68 poin dari realisasi 2024 (99,32%), namun masih berada pada level yang sangat tinggi. Pada tujuan II tahun 2022-2024 memiliki tiga sasaran dan setelah dilakukan revisi Renstra pada tahun 2024 terdapat dua sasaran. Sasaran tersebut adalah :
 - a. Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator Persentase capaian evaluasi LAKIP, dari tahun 2022-2023 capaian kinerja 100% setelah dilakukan revisi Renstra Bappeda terhitung 2024 indikator tersebut tidak dipakai;
 - b. Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Positif tahun 2022–2024, selama tiga tahun berturut-turut terjadi peningkatan konsisten dari 93,75% hingga 99,32% pada 2024, menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam konsistensi perencanaan, sedikit terjadi penurunan di 2025 realisasi



kinerja sebesar 98,64% turun 0,68 poin dari realisasi 2024 (99,32%), namun masih berada pada level yang sangat tinggi;

- c. Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah dengan indikator kinerja Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah, jika dibandingkan capaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan 2022, 2023 dan 2024 adalah sama yaitu 100%.

Secara umum Bappeda Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2021-2026.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai SAKIP		75	
1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%	100%
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	98.64%	100%	98.64%



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.4.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	98.64%	100%	98.64%
1.4.2.2	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Sumber : Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dijelaskan bawah pada pelaksanaan tahun ke empat Rencana Strategis Bappeda dari 5 (lima) indikator kinerja terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan dan Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah, telah memenuhi target kinerja Renstra dengan capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi (100%). Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD dan Persentase Pencapaian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah belum memenuhi target kinerja Renstra akan tetapi secara capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi (98.64%), sementara untuk indikator Nilai SAKIP dalam proses penilaian Inspektorat Kabupaten Kutai Timur. Secara umum Bappeda Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2021-2026.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :



**Tabel 3.6 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai SAKIP		-	-
1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	-	-
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	98.64%	-	-
1.4.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	98.64%	-	-
1.4.2.2	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%	-	-

Sumber : Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Timur tidak terdapat indikator yang sama dengan indikator nasional dan provinsi sehingga tidak dapat dibandingkan akan tetapi indikator kinerja Bappeda selaras dengan indikator nasional dan provinsi

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai SAKIP	74				
1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	Realisasi kinerja berhasil memenuhi target	
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	100%	98.64%	98.64%	Realisasi kinerja belum memenuhi target	
1.4.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	100%	98.64%	98.64%	Realisasi kinerja belum memenuhi target	
1.4.2.2	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Realisasi kinerja berhasil memenuhi target	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel 3.7 Dari tiga indikator kinerja sasaran strategis terdapat dua target indikator kinerja sasaran strategis yang telah tercapai dengan kategori sangat tinggi (100%) dan satu indikator sasaran strategis yang belum mencapai target akan tetapi capaian kinerja masuk dalam kriteria sangat tinggi (98.64%). Analisa penyebab keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja tujuan sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan I : Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik

Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik dengan indikator kinerja Persentase capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan dengan definisi Ketercapaian kegiatan yang



teralisasi pada program penunjang urusan pemerintah daerah., beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan capaian kinerja adalah :

- Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban keuangan dan pengadministrasian dokumen kepegawaian yang lebih tertata.

Sedangkan kendala yang dihadapi untuk pencapaian sasaran Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik dengan indikator Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan antara lain :

- Proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan aplikasi SIPD dimana aplikasi tersebut sering mengalami gangguan sehingga memperlambat proses perencanaan dan penganggaran;
- Kompetensi SDM yang belum optimal mengakibatkan proses administrasi lambat dan pembagian beban kerja yang belum secara keseluruhan merata.

Solusi yang ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan / mempertahankan realisasi target dan perbaikan yang akan datang antara lain :

- Menyampaikan kendala aplikasi SIPD kepada Bappeda sebagai koordinator perencanaan agar disampaikan ke Kemendagri untuk perbaikan aplikasi;
- Peningkatan kompetensi SDM melalui bimtek, pelatihan dan Coaching, pembagian beban kerja yang merata serta peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja SDM;
- Peningkatan koordinasi antar bidang diinternal Bappeda;
- Peningkatan Pelayanan sarana prasarana perkantoran.

Tujuan II : Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran I : Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah dengan indikator kinerja Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dengan definisi Keselarasan antara jumlah program dalam



RKPD tahun 2025 dengan Jumlah program pada RPJMD tahun ke empat (2025). Pada tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi terlihat bahwa capaian kinerja Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah belum memenuhi target akan tetapi masuk dalam kategori sangat tinggi yaitu tercapai 98.64% dengan realisasi 98.64%. Faktor pendukung keberhasilan tersebut antara lain :

- Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tepat waktu;
- Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan kamus usulan masyarakat dan pikir sesuai dengan permasalahan dan prioritas pembangunan;
- Melakukan sosialisasi kamus usulan dan prosedur usulan pikir di SIPD kepada Kepala Desa, Kecamatan dan DPRD;
- Melakukan pendampingan pelaksanaan musrenbang Kecamatan dengan memberikan pendampingan Kepada Desa secara intensif tata cara pengisian usulan musrenbang melalui aplikasi SIPD;
- Program dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026;
- Tahap perencanaan menggunakan aplikasi SIPD;
- Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren;
- Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah, TAPD dan DPRD.

Sasaran II : Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah dengan indikator kinerja Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah dengan definisi keselarasan antara jumlah program dalam Renstra dan Renja dengan Jumlah program dalam RPJMD dan RKPD. Pada tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi terlihat bahwa capaian kinerja Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra



Perangkat Daerah tercapai sebesar 100% dengan realisasi 100%. Faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah :

- Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi tiga bidang sektoral di Bappeda melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendampingan tahun 2025 yang telah dilakukan antara lain pendampingan penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029, Renja tahun 2026 dan Perubahan Renja tahun 2025 dengan melakukan proses verifikasi. Pada proses verifikasi tiga bidang sektoral Bappeda memastikan sistematika penyajian dokumen perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- Penyelarasan atau sinkronisasi program-program dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan Program-program dalam RKPD dan RPJMD melalui proses asistensi Perangkat Daerah dengan Bappeda sesuai dengan sektor Perangkat Daerah;
- Perangkat daerah didorong untuk segera menindak lanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan;
- Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada Perangkat Daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan perencanaan.

Dalam mewujudkan sasaran I: Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah dan sasaran II: Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala antara lain :

- Regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang perubahannya cukup dinamis menuntut PD dan Bappeda untuk cepat beradaptasi dan melaksanakan dalam tahapan perencanaan;



- Keterbatasan jumlah aparatur dibidang perencanaan baik di Bappeda maupun di PD;
- Kurang optimalnya dukungan data yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan;
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- Padatnya schedule pada setiap tahapan perencanaan megakibatkan PD lambat menyerahkan dokumen untuk di asistensi oleh Bappeda;

Solusi yang ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja antara lain :

- Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang cukup dinamis dan timeline penyusunan dokumen perencanaan yang cukup padat diperlukan penguatan kompetensi verifikator di internal Bappeda agar dapat melakukan pendampingan dengan lebih maksimal dan memberikan rekomendasi yang lebih cepat dan valid;
- Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan pada Perangkat Daerah sehingga perangkat daerah dapat dengan cepat merespon dan memahami penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah masing-masing;
- Peningkatan koordinasi di internal Bappeda untuk pendalaman dan menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan asistensi atau verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan Renja dengan lebih intensif baik diinternal Bappeda dan Perangkat Daerah;
- Menggunakan hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja sebagai salah satu dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya dan melakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Ekspose di internal Bappeda hasil asistensi atau verifikasi untuk dicermati bersama-sama;
- Peningkatan koordinasi dalam setiap tahapan pembangunan baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah serta dengan TAPD dan DPRD:



- Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada Perangkat Daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan perencanaan;
- Perangkat daerah didorong untuk melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu;

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	74			24,161,868,122	20,569,470,129	85.13%	
1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	100%	100%	100%	24,161,868,122	20,569,470,129	85.13%	1.17
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	98.64%	98.64%	10,630,575,343	9,017,105,257	84.82%	1.16
1.4.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	100%	98.64%	98.64%	5,554,299,470	5,076,275,873	91.39%	0.01
1.4.2.2	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	100%	100%	100%	5,023,624,250	3,940,829,384	78.45%	1.27

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur Tahun 2025



Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perencanaan Bappeda melakukan efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu :

- I. Tujuan I : Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik capaian kinerja sedang dalam proses penilaian Inspektorat dan capaian anggaran sebesar 85.13 %
 1. Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang baik capaian kinerja sebesar 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 83.13% efisiensi sebesar 1.17.
- II. Tujuan II : Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah capaian kinerja sebesar 98.64% dan capaian anggaran sebesar 84.82% efisiensi sebesar 1.16.
 1. Sasaran : Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah capaian kinerja sebesar 98.64% dan capaian anggaran sebesar 91.39% efisiensi sebesar 0.01.
 2. Sasaran : Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 78.45% efisiensi sebesar 1.27.

Secara keseluruhan untuk pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Bappeda telah melakukan efisiensi antara 0.01 - 1.27.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :



Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai SAKIP						
1.4.1.1	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100%	Menunjang	
1.4.1.1.1.1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	100%	Menunjang	
1.4.1.1.1.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan karena Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dan Tahapan penyusunan perencanaan menggunakan aplikasi SIPD



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1.1.1.1.6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiinerja SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan melakukan koordinasi dengan bidang-bidang diinternal Bappeda dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
1.4.1.1.1.1.7				Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	100%	Menunjang	
1.4.1.1.1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta laporan Keuangan	100%	Menunjang	
1.4.1.1.1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Gaji ASN dan tujangan terbayarkan sesuai dengan regulasi.
1.4.1.1.1.2.3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Bagian Keuangan melakukan koordinasi Ke BPKAD dan dengan bidang-bidang dan selalu memberikan himbauan agar tertib dalam administrasi



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1.1.1.2.5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan rekonsiliasi keuangan dengan BPKAD
1.4.1.1.1.4				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD	100%	Menunjang	
1.4.1.1.1.4.4				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	0%	Menunjang	Realisasi target kinerja tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan, dikarenakan adanya Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Instruksi Bupati Nomor : B-100.3.4.2/04/HUKUM tindak lanjut dari amanat Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 2024 yang berdampak pada pengurangan anggaran.
1.4.1.1.1.5				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	Menunjang	
1.4.1.1.1.5.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor telah terlaksana sehingga dapat mendukung kinerja organisasi



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1.1.1.5.4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.4.1.1.1.5.6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Rapat koordinasi untuk mendukung kinerja Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan.
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	100%	Menunjang	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan.
1.4.1.1.1.6				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan penunjang operasional kantor	100%	Menunjang	
1.4.1.1.1.6.1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik untuk mendukung kelancaran Bappeda menjalankan tugas dan fungsinya.
1.4.1.1.1.6.2				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Jasa pelayanan umum



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			kantor meliputi cleaning service, penjaga malam dan tukang taman.
1.4.1.1.1.7				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	Menunjang	
1.4.1.1.1.7.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan sesuai dengan rencana sehingga kendaraan dinas dapat digunakan dengan optimal untuk mendukung pencapaian kinerja Bappeda.
1.4.1.1.1.7.2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan rencana sehingga peralatan dan mesin lainnya dapat digunakan dengan optimal untuk mendukung pencapaian kinerja Bappeda.
1.4.1.1.1.7.3				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Rehab gedung dilakukan untuk bagian-bagian gedung yang mengalami kerusakan dengan tujuan untuk mendukung kinerja organisasi.
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD	100%			100%	Menunjang	



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pembangunan Daerah	kedalam RKPD						
1.4.2.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	98.64%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	98.64%	Menunjang	
1.4.2.2.1.1				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD	100%	Menunjang	
1.4.2.2.1.1.1				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan ketersediaan data pendukung untuk penyusunan dokumen-dokumen perencanaan.
1.4.2.2.1.1.2				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan untuk penyusunan dokumen RKPD dan RPJMD.
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan, forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah telah dilaksanakan untuk penyusunan RKPD 2026.



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.2.1.1.5				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	100%	Menunjang	Musrenbang Kabupaten telah dilaksanakan untuk pembahasan RKPD 2026 dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan tahun 2026.
1.4.2.2.1.1.6				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	100%	Menunjang	Tahun 2025 telah dilakukan pendampingan kepada desa terkait usulan-usulan desa yang sesuai dengan kamus usulan dan permasalahan yang ada di setiap desa dan selanjutnya diinput dalam aplikasi SIPD.
1.4.2.2.1.1.7				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJ MD/RKPD)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan, koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan telah dilaksanakan untuk pengesahan dokumen RKPD 2026, Perubahan RKPD 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.
1.4.2.2.1.2				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Bahan RKPD	92.42%	Menunjang	
1.4.2.2.1.2.1				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.67%	Menunjang	Realisasi kinerja tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan terjadi kesalahan dalam menentukan target. Meskipun realisasi tidak mencapai target akan tetapi kinerja dari sub kegiatan ini telah dilaksanakan yaitu



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					(Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			pengesahan Dokumen Roadmap 50 Program Prioritas.
1.4.2.2.1.2.2				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan telah dilaksanakan pembinaan terhadap aparatur perencana di PD untuk mendukung peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan.
1.4.2.2.1.3				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen LKPJ	62,50%	Menunjang	
1.4.2.2.1.3.1				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	66,67%	Menunjang	Realisasi kinerja tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan hal ini disebabkan saat terjadi pengurangan anggaran target kinerja tidak disesuaikan. Meskipun realisasi tidak mencapai target akan tetapi kinerja dari sub kegiatan ini telah dilaksanakan yaitu : 1. Laporan Evaluasi BANKEU di Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 2025 2. Laporan Evaluasi DAK Kutai Timur 2025 3. Laporan Evaluasi DBH DR 2025 4. Laporan Evaluasi DBH DR 2025
1.4.2.2.1.3.2				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	50,00%	Menunjang	Realisasi kinerja tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan hal ini disebabkan saat terjadi pengurangan anggaran target kinerja tidak disesuaikan, akan tetapi Monitoring



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Evdoren.
1.4.2.2.1.4				Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi SIPD pada Penyusunan Perencanaan Daerah	100%	Menunjang	
1.4.2.2.1.4.2				Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tahap perencanaan dan penganggaran telah menggunakan aplikasi SIPD.
1.4.2.2.1.4.3				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pembinaan kepada perangkat daerah terkait SIPD telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan di PD.
1.4.2.3.1	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD ke dalam Renstra dan Renja OPD	100%	Menunjang	



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.3.1.1				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	Menunjang	
1.4.2.3.1.1.1				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD TA 2026, Perubahan RKPD TA 2025 dan RPJMD 2025-2029.
1.4.2.3.1.1.2				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang pemerintahan telah dilaksanakan untuk semua PD.
1.4.2.3.1.1.5				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Pembangunan Manusia telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD TA 2026, Perubahan RKPD TA 2025 dan RPJMD 2025-2029.



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					(RPJPD, RPJMD dan RKPd)			
1.4.2.3.1.1.6				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Pembangunan Manusia telah dilaksanakan.
1.4.2.3.1.1.7				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Pembangunan Manusia telah dilaksanakan.
1.4.2.3.1.1.8				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan PD dibawah bidang Pembangunan Manusia dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pusat.



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.3.1.2				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA	100%	Menunjang	
1.4.2.3.1.2.1				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD TA 2026, Perubahan RKPD TA 2025 dan RPJMD 2025-2029.
1.4.2.3.1.2.2				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian telah dilaksanakan
1.4.2.3.1.2.3				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian telah dilaksanakan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.3.1.2.4				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan PD dibawah bidang Perekonomian dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pusat
1.4.2.3.1.2.5				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang SDA telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD TA 2026, Perubahan RKPD TA 2025 dan RPJMD 2025-2029.
1.4.2.3.1.2.6				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang SDA telah dilaksanakan.
1.4.2.3.1.2.7				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang SDA telah dilaksanakan.



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Perangkat Daerah Bidang SDA			
1.4.2.3.1.2.8				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan PD dibawah bidang SDA dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
1.4.2.3.1.3				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya Kegiatan Perencanaan OPD di Bidag Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	Menunjang	
1.4.2.3.1.3.1				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Infrastuktur telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD TA 2026, Perubahan RKPD TA 2025 dan RPJMD 2025-2029.
1.4.2.3.1.3.2				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Infrastuktur telah dilaksanakan.



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.3.1.3.3				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Infrastruktur telah dilaksanakan.
1.4.2.3.1.3.4				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan PD dibawah bidang Infrastruktur dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
1.4.2.3.1.3.5				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang kewilayahan telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD TA 2026, Perubahan RKPD TA 2025 dan RPJMD 2025-2029.
1.4.2.3.1.3.6				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			daerah dibawah koordinasi bidang kewilayahan telah dilaksanakan.
1.4.2.3.1.3.7				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang kewilayahan telah dilaksanakan.
1.4.2.3.1.3.8				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan PD dibawah bidang kewilayahan dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pusat.

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur Tahun 2025



Berdasarkan dari hasil tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan dapat disimpulkan bahwa :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan pelaksanaan 7 (Tujuh) kegiatan dan 16 (Enam Belas) sub kegiatan. 15 sub kegiatan capaian kinerja pada kegiatan mencapai 100% dan satu sub kegiatan belum mencapainya target kinerja hal ini disebabkan pada saat perubahan anggaran tidak diikuti dengan perubahan target/pengurangan target. Faktor – Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja Bappeda;
- Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan, pertanggung jawaban keuangan dan pengadministrasian dokumen kepegawaian yang lebih tertata.

Sedangkan faktor penghambat atau kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

- Proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan aplikasi SIPD dimana aplikasi tersebut sering mengalami gangguan sehingga memperlambat proses perencanaan dan penganggaran;
- Kompetensi SDM yang belum optimal mengakibatkan proses administrasi lambat dan pembagian beban kerja yang belum secara keseluruhan merata.

Solusi yang ditempuh untuk mempertahankan capaian target kinerja/perbaikan kedepan antara lain :



- Menyampaikan kendala aplikasi SIPD kepada Bappeda sebagai koordinator perencanaan agar disampaikan ke Kemendagri untuk perbaikan aplikasi;
 - Peningkatan kompetensi SDM melalui bimtek, pelatihan dan Coaching, pembagian beban kerja yang merata serta peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja SDM;
 - Peningkatan koordinasi antar bidang diinternal Bappeda;
 - Peningkatan Pelayanan sarana prasarana perkantoran.
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Terdiri atas 4 (Empat) kegiatan dan 12 (Dua Belas) sub kegiatan. Dari 4 (Empat) Kegiatan terdapat 2 (Dua) capaian target tidak terealisasi 100%, dikarenakan adanya Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Instruksi Bupati Nomor : B-100.3.4.2/04/HUKUM tindak lanjut dari amanat Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 2024 yang berdampak pada pengurangan anggaran dan sub kegiatan yang mana target kinerja dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan pada 2 (Dua) Kegiatan tersebut tidak dikurangi pada saat penginputan DPPA 2025. Kegiatan tersebut antara lain :
- a. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Meskipun dari 2 (Dua) Kegiatan tersebut target kinerja tidak terealisasi 100%, akan tetapi 2 (Dua) Kegiatan tersebut mampu menjalankan tugas dan fungsi Bappeda dibidang Perencanaan diantaranya Penyusunan Dokumen RPJMD 2025-2029, RKPD 2026 dan RKPD perubahan 2025 dan Penyusunan Dokumen LKPJ TA 2024.

Capaian target Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah belum mencapai target, dikarenakan adanya penyesuaian-penyesuaian program pada perangkat daerah sehingga terdapat perbedaan antara jumlah program dalam RKPD Kabupaten Kutai



Timur Taun 2025 dengan jumlah Program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur. Jumlah program dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Timur sebanyak 291 program sedangkan jumlah program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 295 program, tetapi capaian program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah tetap masuk dalam kategori sangat tinggi (98,64%). Faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah antara lain :

- Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dan tepat waktu;
- Berkoordinasi dengan Perangkat daerah dalam penyusunan kamus usulan masyarakat dan pikir sesuai dengan permasalahan dan prioritas pembangunan;
- Melakukan sosialisasi kamus usulan dan prosedur usulan pikir di SIPD kepada Kepala Desa, Kecamatan dan DPRD;
- Melakukan pendampingan pelaksanaan musrenbang Kecamatan dengan memberikan pendampingan Kepada Desa secara intensif tata cara pengisian usulan musrenbang melalui aplikasi SIPD;
- Program dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026;
- Tahap perencanaan menggunakan aplikasi SIPD;
- Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren sehingga mempercepat proses evaluasi;
- Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah, TAPD dan DPRD.

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Capaian target Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100% didukung dengan pelaksanaan 3 (Tiga)



kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) sub kegiatan, adapun faktor-faktor yang mendorong ketercapaian target Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

- Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi tiga bidang sektoral di Bappeda melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendampingan tahun 2025 yang telah dilakukan antara lain pendampingan penyusunan Renstra PD 2025-2029, Renja tahun 2026 dan Perubahan Renja tahun 2025 dengan melakukan proses verifikasi. Pada proses verifikasi tiga bidang sektoral Bappeda memastikan sistematika penyajian dokumen perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- Penyelarasan atau sinkronisasi program-program dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan Program-program dalam RKPD dan RPJMD melalui proses asistensi Perangkat Daerah dengan Bappeda sesuai dengan sektor Perangkat Daerah;
- Perangkat daerah didorong untuk segera menindak lanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan;
- Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada Perangkat Daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam proses penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

Selain faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat beberapa kendala antara lain :



- Regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang perubahannya cukup dinamis menuntut PD dan Bappeda untuk cepat beradaptasi dan melaksanakan dalam tahapan perencanaan;
- Keterbatasan jumlah aparatur dibidang perencanaan baik di Bappeda maupun di PD;
- Kurang optimalnya dukungan data yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan;
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- Padatnya schedule pada setiap tahapan perencanaan;
- Perangkat daerah lambat menyerahkan dokumen untuk di asistensi oleh Bappeda;

Solusi yang ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan / mempertahankan realisasi target antara lain :

- Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang cukup dinamis dan timeline penyusunan dokumen perencanaan yang cukup padat diperlukan penguatan kompetensi verifikator di internal Bappeda agar dapat melakukan pendampingan dengan lebih maksimal dan memberikan rekomendasi yang lebih cepat dan valid;
- Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan pada Perangkat Daerah sehingga perangkat daerah dapat dengan cepat merespon dan memahami penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah masing-masing;
- Peningkatan koordinasi di internal Bappeda untuk pendalaman dan menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan asistensi atau verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah;
- Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Renja dengan lebih intensif baik diinternal Bappeda dan Perangkat Daerah;
- Menggunakan hasil dari monitoring evaluasi pelaksanaan Renja sebagai salah satu dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya dan melakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;



- Ekspose di internal Bappeda hasil asistensi atau verifikasi untuk dicermati bersama-sama;
- Peningkatan koordinasi dalam setiap tahapan pembangunan baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah serta dengan TAPD dan DPRD;
- Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada Perangkat Daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan perencanaan;
- Perangkat daerah didorong untuk melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu;

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.161.868.122	20.569.470.129	85,13
1.4.2.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	344.013.110	258.462.735	75,13
1.4.2.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	179.533.110	131.492.037	73,24



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1.1.62	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.215.000	62.835.278	81,38
1.4.2.1.1.1.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	87.265.000	64.135.420	73,50
1.4.2.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.833.942.915	15.479.700.110	86,80
1.4.2.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.295.513.545	15.035.537.860	86,93
1.4.2.1.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	449.302.370	389.782.650	86,75
1.4.2.1.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	89.127.000	54.379.600	61,01
1.4.2.1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.280.000	23.280.000	100,00
1.4.2.1.1.4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.280.000	23.280.000	100,00
1.4.2.1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.790.940.711	3.892.034.426	81.24
1.4.2.1.1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,079,125,128	1,799,210,900	86.54
1.4.2.1.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	504,189,455	342,889,849	68.01



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1.5.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,270,039,500	1,061,195,727	83,56
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.346.400.000	1.094.999.984	81,33
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.346.400.000	1.094.999.984	81,33
1.4.2.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.595.018	937.019.879	85,14
1.4.2.1.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	360.000.000	217.424.861	60,40
1.4.2.1.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	740.595.018	719.595.018	97,16
1.4.2.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	957.642.500	660.936.798	69,02
1.4.2.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	422.750.000	274.746.798	64,99
1.4.2.1.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.400.000	161.670.000	68,97
1.4.2.1.1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.492.500	224.520.000	74,72



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.2.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	14,764,061,586	12,765,093,040	86,46
1.4.2.2.1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4.239.846.400	3.921.705.285	92,50
1.4.2.2.1.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.002.146.715	977.950.915	97,59
1.4.2.2.1.1.4	Pelaksanaan Konsultasi Publik	113.496.000	89.030.000	78,44
1.4.2.2.1.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	40.669.000	40.669.000	100,00
1.4.2.2.1.1.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	409.659.000	331.763.914	80,99
1.4.2.2.1.1.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	120.388.000	108.768.000	90,35
1.4.2.2.1.1.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2.553.487.685	2.373.523.456	92,95
1.4.2.2.1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	223.005.000	218.680.500	98,06



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.2.1.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	111.581.000	110.354.700	98,90
1.4.2.2.1.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	111.424.000	108.325.800	97,22
1.4.2.2.1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	940.078.870	798.071.488	84,89
1.4.2.2.1.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	502.598.250	439.677.278	87,48
1.4.2.2.1.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	437.480.620	358.394.210	81,92
1.4.2.2.1.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	151.369.200	137.818.600	91,05
1.4.2.2.1.4.2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	29.265.000	27.230.000	93,05
1.4.2.2.1.4.3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	122.104.200	110.588.600	90,57



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.3.1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.023.624.250	3.940.829.384	78,45
1.4.2.3.1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.864.267.200	1.364.861.503	73,21
1.4.2.3.1.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	191.858.000	158.959.180	82,85
1.4.2.3.1.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	136.936.000	94.606.500	69,09
1.4.2.3.1.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.136.172.200	880.602.542	77,51
1.4.2.3.1.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	41.147.000	36.452.501	88,59
1.4.2.3.1.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	106.220.000	57.030.180	53,69



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
1.4.2.3.1.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	251.934.000	137.210.600	54,46
1.4.2.3.1.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.746.424.000	1.385.500.056	79,33
1.4.2.3.1.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	370.077.000	326.379.400	88,19
1.4.2.3.1.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	117.097.000	78.944.000	67,42
1.4.2.3.1.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	256.488.000	203.325.900	79,27
1.4.2.3.1.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	312.050.000	260.233.700	83,39



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			
1.4.2.3.1.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	214.417.000	157.972.200	73,68
1.4.2.3.1.2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	111.099.000	78.916.056	71,03
1.4.2.3.1.2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	204.384.000	149.347.600	73,07
1.4.2.3.1.2.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	160.812.000	130.381.200	81,08
1.4.2.3.1.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.412.933.050	1.190.467.825	84,26
1.4.2.3.1.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	467.668.050	399.497.328	85,42



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.3.1.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	145.250.000	132.542.838	91,25
1.4.2.3.1.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	115.164.000	77.600.000	67,38
1.4.2.3.1.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	204.583.000	181.661.003	88,80
1.4.2.3.1.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	123.768.000	110.606.951	89,37
1.4.2.3.1.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	206.914.000	167.707.100	81,05
1.4.2.3.1.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	65.784.000	49.840.105	75,76



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Daerah Bidang Kewilayahan			
1.4.2.3.1.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	83.802.000	71.012.500	84,74

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan didukung dengan pelaksanaan 3 (Tiga) Program 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 50 (Lima Puluh) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 34.739.791.842,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.586.575.386,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) Sisa anggaran sebesar Rp. 5.153.216.456,00 (Lima Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Empat Puluh Lima Ribu Enam Rupiah) atau realisasi anggaran sebesar 85.17%.

Adapun penyebab anggaran tidak dapat 100% terealisasi adalah :

- Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN, Gaji TK2D dan belanja honorarium direalisasikan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan jumlah ASN dan TK2D di Bappeda serta proses pengangkatan TK2D menjadi P3K yang tidak sesuai dengan rencana sehingga menyebabkan silpa yang cukup besar pada sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 2.259.975.685
- Anggaran belanja pakai habis seperti ATK, bahan cetak, suvernir/ cendera mata, makan minum rapat dibelanjakan sesuai kebutuhan;



- Anggaran belanja perjalanan dinas yang tidak dapat direalisasikan 100% karena Bappeda sebagai koordinator perencanaan sebagian besar perjalanan dinas berdasarkan undangan dari Perangkat Daerah, provinsi dan kementerian sehingga sehingga jika tidak ada undangan maka anggaran perjalanan dinas tidak digunakan;

Solusi untuk perbaikan kedepan antara lain :

- Dalam tahapan perencanaan Kepala Bidang di Bappeda menyampaikan rencana aksi, target kinerja dan kebutuhan anggaran yang dilengkapi dengan identifikasi pengadaan barang/jasa, menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa dan penyusunan kerangka acuan kerja sub kegiatan yang dipresentasikan / disampaikan kepada Kepala Bappeda;
- Lebih intensif melakukan pengendalian dan evaluasi realisasi keuangan;
- Pada saat melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) perlu dilakukan analisis lebih komperhensif terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sebagai dasar untuk pengurangan atau penambahan pagu anggaran perubahan serta lebih teliti dalam menentukan target.

Meskipun realisasi anggaran tidak terealisasi 100%, Bappeda mampu menjalankan tugas dan fungsi Bappeda dibidang Perencanaan antara lain :

1. Penyusunan Dokumen RPJMD 2025- 2029;
2. Penyusunan Dokumen RKPD 2026;
3. Penyusunan Dokumen P RKPD 2025;
4. Penyusunan Dokumen LKPJ TA 2024;
5. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja 2025;
6. Penyusunan Dokumen Renstra Bappeda 2025-2029;
7. Pendampingan & Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
8. Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah, Provinsi dan Kementerian;
9. Penyusunan Dokumen RAT Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2026;
10. Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2024;
11. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda;



12. Pembayaran Gaji dan TPP ASN;
13. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan perkantoran.

3.2.1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.4.2.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur	100 %	100	100	24.161.868.122	20.569.470.129	85,13	1,17
1.4.2.1.1.1	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100	100	344.013.110	258.462.735	75,13	1,33
1.4.2.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7	100	179.533.110	131.492.037	73,24	1,37
1.4.2.1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6	100	77.215.000	62.835.278	81,38	1,23
1.4.2.1.1.1.7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	4 Dokumen	4	100	87.265.000	64.135.420	73,50	1,36
1.4.2.1.1.2	Administrasi Keuangan	100 %	100	100	17.833.942.915	15.479.700.110	86,80	1,15



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Perangkat Daerah							
1.4.2.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/Bulan	106	100	17.295.513.545	15.035.537.860	86,93	1,15
1.4.2.1.1.2.3	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	80 Dokumen	80	100	449.302.370	389.782.650	86,75	1,15
1.4.2.1.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5	100	89.127.000	54.379.600	61,01	1,64
1.4.2.1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100	100	23.280.000	23.280.000	100,00	1,00
1.4.2.1.1.4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	113 Orang	113	100	23.280.000	23.280.000	100,00	1,00
1.4.2.1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100	100	2.555.994.579	2.115.070.623	82,75	1,21
1.4.2.1.1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Paket	15	100	1.154.627.579	1.110.480.242	96,18	1,04
1.4.2.1.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Paket	25	100	521.344.000	382.101.950	73,29	1,36
1.4.2.1.1.5.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50	100	880.023.000	622.488.431	70,74	1,41
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	100	100	1.346.400.000	1.094.999.984	81,33	1,23



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Pemerintah Daerah							
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	6	100	1.346.400.000	1.094.999.984	81,33	1,23
1.4.2.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100	100	1.100.595.018	937.019.879	85,14	1,17
1.4.2.1.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12	100	360.000.000	217.424.861	60,40	1,66
1.4.2.1.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	3	100	740.595.018	719.595.018	97,16	1,03
1.4.2.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100	100	957.642.500	660.936.798	69,02	1,45
1.4.2.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52 Unit	52	100	422.750.000	274.746.798	64,99	1,54
1.4.2.1.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150 Unit	150	100	234.400.000	161.670.000	68,97	1,45
1.4.2.1.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	4	100	300.492.500	224.520.000	74,72	1,34
1.4.2.2.1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100 %	98.64	98.64	5.554.299.470	5.076.275.873	91,39	1,08



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Pembangunan Daerah							
1.4.2.2.1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100 %	100	100	4.239.846.400	3.921.705.285	92,50	1,08
1.4.2.2.1.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2	100	1.002.146.715	977.950.915	97,59	1,02
1.4.2.2.1.1.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2	100	113.496.000	89.030.000	78,44	1,27
1.4.2.2.1.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1	100	40.669.000	40.669.000	100,00	1,00
1.4.2.2.1.1.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2	100	409.659.000	331.763.914	80,99	1,23
1.4.2.2.1.1.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	2820 Usulan	2820	100	120.388.000	108.768.000	90,35	1,11
1.4.2.2.1.1.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3	100	2.553.487.685	2.373.523.456	92,95	1,08
1.4.2.2.1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	100 %	92,42	92,42	223.005.000	218.680.500	98,06	0,94
1.4.2.2.1.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Dokumen	1	16,67	111.581.000	110.354.700	98,90	0,17
1.4.2.2.1.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan	60 Orang	60	100	111.424.000	108.325.800	97,22	1,03



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah							
1.4.2.2.1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	62,50	62,50	940.078.870	798.071.488	84,89	0,74
1.4.2.2.1.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	6 Laporan	4	66,67	502.598.250	439.677.278	87,48	0,76
1.4.2.2.1.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Lapooran	1	50,00	437.480.620	358.394.210	81,92	0,61
1.4.2.2.1.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100 %	100	100	151.369.200	137.818.600	91,05	1,10
1.4.2.2.1.4.2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1	100	29.265.000	27.230.000	93,05	1,07
1.4.2.2.1.4.3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah	1 Dokumen	1	100	122.104.200	110.588.600	90,57	1,10
1.4.2.3.1	Program Koordinasi Dan	100 %	100	100	5.023.624.250	3.940.829.384	78,45	1,27



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
1.4.2.3.1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100	100	1.864.267.200	1.364.861.503	73,21	1,37
1.4.2.3.1.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD), RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3	100	191.858.000	158.959.180	82,85	1,21
1.4.2.3.1.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	2	100	136.936.000	94.606.500	69,09	1,45
1.4.2.3.1.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3	100	1.136.172.200	880.602.542	77,51	1,29
1.4.2.3.1.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	2	100	41.147.000	36.452.501	88,59	1,13
1.4.2.3.1.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	2 Laporan	1	100	106.220.000	57.030.180	53,69	1,86



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
1.4.2.3.1.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2	100	251.934.000	137.210.600	54,46	1,84
1.4.2.3.1.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	100	100	1.746.424.000	1.385.500.056	79,33	1,26
1.4.2.3.1.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3	100	370.077.000	326.379.400	88,19	1,13
1.4.2.3.1.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	2	100	117.097.000	78.944.000	67,42	1,48
1.4.2.3.1.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	2 Laporan	1	100	256.488.000	203.325.900	79,27	1,26
1.4.2.3.1.2.4	Koordinasi Pelaksanaan	1 Laporan	1	100	312.050.000	260.233.700	83,39	1,20



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian							
1.4.2.3.1.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3	100	214.417.000	157.972.200	73,68	1,36
1.4.2.3.1.2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	2	100	111.099.000	78.916.056	71,03	1,41
1.4.2.3.1.2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	1	100	204.384.000	149.347.600	73,07	1,37
1.4.2.3.1.2.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1	100	160.812.000	130.381.200	81,08	1,23
1.4.2.3.1.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100	100	1.412.933.050	1.190.467.825	84,26	1,19
1.4.2.3.1.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3	100	467.668.050	399.497.328	85,42	1,17

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
1.4.2.3.1.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	2	100	145.250.000	132.542.838	91,25	1,10
1.4.2.3.1.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	1	100	115.164.000	77.600.000	67,38	1,48
1.4.2.3.1.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1	100	204.583.000	181.661.003	88,80	1,13
1.4.2.3.1.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3	100	123.768.000	110.606.951	89,37	1,12
1.4.2.3.1.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	2	100	206.914.000	167.707.100	81,05	1,23
1.4.2.3.1.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	2 Laporan	1	100	65.784.000	49.840.105	75,76	1,32



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan							
1.4.2.3.1.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1	100	83.802.000	71.012.500	84,74	1,18

Berdasarkan dari hasil tabel perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perencanaan, Bappeda melakukan efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 85.13 % efisiensi sebesar 1.17.

Faktor – faktor yang mempengaruhi efisiensi sumber daya dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta melakukan perubahan anggaran sesuai dengan prioritas pencapaian target dan sesuai dengan kebutuhan;
- Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja Bappeda;
- Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan, pertanggung jawaban keuangan dan pengadministrasian dokumen kepegawaian yang lebih tertata;



2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah capaian kinerja sebesar 98.64 % dan capaian anggaran sebesar 91.39 % efisiensi sebesar 1.08. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 78.45 % efisiensi sebesar 1.27.

Faktor – faktor yang mempengaruhi efisiensi sumber daya dari Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 91.39 % efisiensi sebesar 1.08 antara lain :

- Bappeda sebagai penanggung jawab atau koordinator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dan tepat waktu;
- Tahap perencanaan menggunakan aplikasi SIPD sehingga mempermudah dalam pemantauan terhadap perangkat daerah dalam tahapan perencanaan;
- Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi baik dengan perangkat daerah maupun pemerintah pusat dan provinsi beberapa kegiatan dilaksanakan secara online sehingga dapat dilakukan penghematan anggaran ;
- Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren sehingga mempercepat waktu dalam melakukan pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Bappeda secara rutin melaksanakan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta melakukan perubahan anggaran untuk pencapaian target program prioritas dan sesuai dengan kebutuhan;



- Dalam rangka mewujudkan kualitas perencanaan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien Bappeda melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah, TAPD dan DPRD.

BAB IV PENUTUP







BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025. Penyusunan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki 2 (Dua) tujuan dan 3 (Tiga) sasaran strategis, sebagai berikut :
 - I. Tujuan I : Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik dengan indikator nilai SAKIP sedang dalam proses penilaian Inspektorat
 1. Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik dengan indikator Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan capaian kinerja sebesar 100% (Sangat Tinggi).
 - II. Tujuan II : Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD capaian kinerja sebesar 98.64% (Sangat Tinggi).



1. Sasaran I : Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi dengan indikator Persentase pencapaian pelaksanaan Renja capaian kinerja sebesar 100% (Sangat Tinggi);
 2. Sasaran II : Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah dengan indikator Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah capaian kinerja sebesar 100% (Sangat Tinggi).
1. Faktor-faktor pendukung tercapainya sasaran strategis Bappeda adalah :
- Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja Bappeda;
 - Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban keuangan dan pengadministrasian dokumen kepegawaian yang lebih tertata;
 - Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017;
 - Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi tiga bidang sektoral di Bappeda melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendampingan tahun 2025 yang telah dilakukan antara lain pendampingan penyusunan Renstra 2025-2029, Renja tahun 2026 dan Perubahan Renja tahun 2025 dengan melakukan proses verifikasi. Pada proses verifikasi tiga bidang sektoral Bappeda



memastikan sistematika penyajian dokumen perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan tepat waktu;

- Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan kamus usulan masyarakat dan pikir sesuai dengan permasalahan dan prioritas pembangunan;
 - Melakukan inisiasi pendampingan pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan memberikan pendampingan kepada desa secara intensif tata cara pengisian usulan musrenbang melalui aplikasi SIPD;
 - Melakukan sosialisai kamus usulan dan prosedur usulan pikir di SIPD kepada DRPD;
 - Pada saat penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD);
 - Tahap perencanaan menggunakan aplikasi SIPD;
 - Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren;
 - Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat daerah, TAPD dan DPRD;
 - Perangkat daerah didorong untuk segera menindak lanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan;
 - Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada perangkat daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, aparatur Bappeda siap memberikan pendampingan dan saran masukan kepada perangkat daerah.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Bappeda untuk tercapainya tujuan dan sasaran strategis adalah :
- Regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang perubahannya cukup dinamis menuntut PD dan Bappeda untuk cepat memahami dan melaksanakan dalam tahapan perencanaan;
 - Keterbatasan jumlah aparatur dibidang perencanaan baik di Bappeda maupun di PD;



- Kurang optimalnya dukungan data yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan;
 - Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
 - Padatnya schedule pada setiap tahapan perencanaan;
 - Perangkat daerah lambat menyerahkan dokumen untuk di asistensi oleh Bappeda;
3. Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 34,739,791,842 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 29,586,575,386 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 85,17% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1.17.
4. Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Perbaikan ke depan untuk pencapaian target Sasaran Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota) adalah :
- Dalam tahapan perencanaan Kepala Bidang di Bappeda menyampaikan rencana aksi, target kinerja dan kebutuhan anggaran yang dilengkapi dengan identifikasi pengadaan barang/jasa, menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa dan penyusunan kerangka acuan kerja sub kegiatan yang dipresentasikan/ disampaikan kepada Kepala Bappeda;
 - Lebih intensif melakukan pengendalian dan evaluasi realisasi keuangan;
 - Pada saat melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) perlu dilakukan analisis lebih komperhensif terhadap hasil evaluasi



pelaksana Renja sebagai dasar untuk pengurangan atau penambahan target kinerja dan pagu anggaran perubahan;

b. Perbaikan kedepan untuk pencapaian target Sasaran Strategis : Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah dan Sasaran Strategis : Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah (Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah) adalah :

- Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang cukup dinamis dan timeline penyusunan dokumen perencanaan yang cukup padat diperlukan penguatan kompetensi verifikator di internal Bappeda agar dapat melakukan pendampingan dengan lebih maksimal dan memberikan rekomendasi yang lebih cepat dan valid;
- Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan pada Perangkat Daerah sehingga perangkat daerah dapat dengan cepat merespon dan memahami penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah masing-masing;
- Peningkatan koordinasi di internal Bappeda untuk pendalaman dan menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan asistensi atau verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah;
- Melakukan pengendalian evaluasi pelaksanaan Renja dengan lebih intensif baik diinternal Bappeda dan Perangkat Daerah;
- Menggunakan hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja sebagai salah satu dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya dan melakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Ekspose di internal Bappeda hasil asistensi atau verifikasi untuk dicermati bersama-sama;
- Peningkatan koordinasi dalam setiap tahapan pembangunan baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah serta dengan TAPD dan DPRD.



- Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada Perangkat Daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan perencanaan;
- Perangkat daerah didorong untuk melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu;
- Percepatan adaptasi penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD dengan berkoordinasi ke BPKAD dan pelaksanaan pelatihan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Sangatta, 24 Februari 2026

Kepala Badan



Januar Bayu Irawan, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP 198501122011011003

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

KABUPATEN KUTAI TIMUR



**Perjanjian Kinerja
Eselon II dengan Bupati**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Noviari Noor, S.T., M.T.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ardiansyah Sulaiman**
Jabatan : Bupati Kutai Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Bupati Kutai Timur

Plt. Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur


Ardiansyah Sulaiman



Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik.	Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%
2.	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah.	Persentase Pencapaian Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	100%
3.	Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah.	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 24.161.868.122	
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Rp. 5.554.299.470	
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rp. 5.023.624.250	

Sangatta, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Bupati Kutai Timur

Pt. Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur



A blue ink handwritten signature, appearing to read 'Noviari', is written over the printed name.

Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004



Perjanjian Kinerja

Eselon III dengan Eselon II



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M.Syaiful, S.Sos**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : 19690101 200212 1 015
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Noviari Noor, S.T., M.T.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Plt. Sekretaris



Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

M. Syaiful, S.Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690101 200212 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD.	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun.	100%
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan Keuangan.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan Keuangan.	100%
3	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD.	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD.	100%
4	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD.	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD.	100%
5	Tersedianya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	100%
6	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor.	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor.	100%
7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara.	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp. 344.013.110	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Rp. 17.833.942.915	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Rp. 23.280.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Rp. 2.555.994.579	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Rp. 1.346.400.000	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp. 1.100.595.018	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp. 957.642.500	

Sangatta, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Plt. Sekretaris



Noviari Noor, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671108 200212 1 004

M. Syaiful, S.Sos.

Pembina (IV/a)

NIP. 19690101 200212 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Marhadyn, SKM., MPH.**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP. : 19780328 200012 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Noviari Noor, S.T., M.T.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah



Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Marhadyn, SKM., MPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19780328 200012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan.	Tersusunnya Dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD.	100%
2	Terpenuhinya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Daerah.	Tersusunnya Dokumen Bahan RKPD.	100%
3	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah.	Tersusunnya Dokumen LKPJ.	100%
4	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bidang Pembangunan Daerah.	Terlaksananya Implementasi SIPD Pada Penyusunan Perencanaan Daerah.	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.	Rp. 4.239.846.400	
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rp. 223.005.000	
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rp. 940.078.870	
4.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.	Rp. 151.369.200	

Sangatta, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah



Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Marhadyn, SKM., MPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19780328 200012 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Syaiful, S.Sos.**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP. : 19690101 200212 1 015
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Noviari Noor, S.T., M.T.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia



Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

M. Syaiful, S.Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690101 200212 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp. 1.864.267.200	

Sangatta, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia



Noorri Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

M. Syaiful, S.Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690101 200212 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ripto Widargo, S.TP., MT.**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP. : 19721219 200003 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Noviari Noor, S.T., M.T.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam



Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Ripto Widargo, S.TP., MT.
Pembina (IV/a)
NIP. 19721219 200003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Perekonomian dan SDA.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA.	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).	Rp. 1.746.424.000	

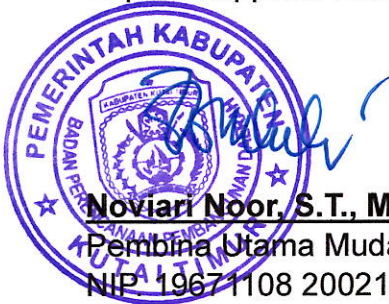
Sangatta, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam



Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Ripto Widargo, S.TP., MT.
Pembina (IV/a)
NIP. 19721219 200003 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sugiyono, S.Hut., MP.**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP. : 19730313 199403 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Noviari Noor, S.T., M.T.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan



Noviari Noor, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Sugiyono, S.Hut., MP.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730313 199403 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. 1.412.933.050	

Sangatta, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan



Noviari Noor, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671108 200212 1 004

Sugiyono, S.Hut., MP.

Pembina (IV/a)

NIP. 19730313 199403 1 006



Perjanjian Kinerja

Eselon IV dengan Eselon III



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada 0hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mitha Ferdina, S.Sos., M.Si.**
Pangkat : Penata TK.I (III/d)
NIP. : 19870224 201101 2 017
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **M. Syaiful, S.Sos.**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP. : 19690314 199802 1 005
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. Sekretaris

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian



M. Syaiful, S.Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690314 199802 1 005

Mitha Ferdina, S.Sos., M.Si.
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19870224 201101 2 017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	133 Orang
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket
3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket
4	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan
5	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit
6	Terbayarkannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
7	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan
8	Terlaksananya Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit
9	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit
10	Terlaksananya Perjanjian Kontrak Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4 Unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 23.280.000	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.154.627.579	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 521.344.000	
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 880.023.000	
5.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 1.346.400.000	
6.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 360.000.000	
7.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 740.595.018	
8.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 422.750.000	
9.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 234.400.000	
10.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 300.492.500	

Sangatta, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Pt. Sekretaris

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian



M. Syariful S.Sos.

Perdana (IV/a)

NIP. 19690101 200212 1 015

Mitha Ferdina, S.Sos., M.Si.

Penata TK. I (III/d)

NIP. 19870224 201101 2 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rifianti, SE., MM.**
Pangkat : Penata TK I (III/d)
NIP. : 19820120 201001 2 006
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **M. Syaiful, S.Sos.**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP. : 19690101 200212 1 015
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. Sekretaris

Kasubbag. Keuangan

M. Syaiful, S.Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690101 200212 1 015

Rifianti, SE., MM.
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19820120 201001 2 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/Bulan
2.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80 Dokumen
3.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Rp. 17.295.513.545	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Rp. 449.302.370	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Rp. 89.127.000	

Sangatta, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. Sekretaris

Kasubbag. Keuangan



Rifianti, SE., MM.

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19820120 201001 2 006

